

REALITAS POLITIK DALAM MEDIA MASSA (Konstruksi Pemberitaan Media Massa Seputar 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK)

Nacota Yeshida Sapahuma

Abstracs

This journal focus on political news contruction about 100 days of Jokowi-JK's cabinet by Kompas, Republika and Media Indonesia newspapers. This topic is quite interesting to be published because it is an early evaluation to new government's work, and as a tool for citizen to measure government's ability in their first 100 days. Since the 100 days of Jokowi-JK's cabinet was an important issue, many electronic and printed mass media took it as a headline, so does Kompas, Republika and Media Indonesia. Every mass media has their own framing and characteristic to define 100 days of Jokowi-JK's cabinet issue.

Keywords: 100 days of Jokowi-JK, news construction, media framing analysis.

A. Pendahuluan

Peristiwa tentang politik itu sendiri selalu menarik perhatian media massa sebagai bahan berita, hal ini dikarenakan oleh dua faktor. Pertama, politik berada di era mediasi (*politics in the age of mediation*), yakni hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa. Malahan para aktor politik senantiasa berusaha menarik perhatian wartawan agar ativities politiknya memperoleh liputan dari mereka. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita. Apalagi jika peristiwa politik itu bersifat luar biasa seperti pergantian presiden di tengah masa jabatan dan pembubaran parlemen. Alhasil, liputan politik senantiasa menghiasi berbagai media setiap harinya (Hamad, 2004: 1-2) .

Topik berita politik sangat luas, mulai dari kebijakan, sikap politik pejabat negara (*action or inaction*), isu publik, konflik kepentingan, lembaga/ institusi politik, aktor politik, hingga sistem politik secara keseluruhan. Elit politik yang terlibat dalam dinamika politik, pada saat yang sama juga mengambil manfaat dari ekspose media tersebut, kecuali jika elit politik tersebut menjadi bagian dari sebuah masalah yang akan diberitakan. Agar peristiwa tersebut menjadi berita politik, Hamad (2004: 2) menyatakan setidaknya ada tiga tindakan yang dilakukan oleh pekerja media dalam konstruksi realitas politik yang berujung pada pembentukan citra sebuah kekuatan politik, yaitu: pemilihan simbol (fungsi bahasa), pemilihan fakta yang akan disajikan (*framing strategy*), dan kesediaan memberi tempat (*agenda setting*) oleh media.

Memang harus diakui, efektivitas media untuk suatu perubahan politik memerlukan situasi politik yang kondusif, yang populer disebut keterbukaan pers. Tetapi pers yang bebas merupakan salah satu indikator adanya keterbukaan politik itu. Pers yang bebas juga bisa merangsang terjadinya kebebasan politik. Pemberitaan-pemberitaan politik yang aktual dan kritis dapat memberi kesadaran pada masyarakat tentang perlunya sistem politik yang lebih demokratis.

Pada prakteknya media tidak hanya mengirimkan informasi apa adanya, tetapi berpartisipasi secara aktif menyikapi realitas politik sebagai aktor politik bagi diri mereka sendiri (Page, 1996). Media melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses politik yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat. Peran inilah

yang diharapkan dijalankan oleh media guna memajukan demokrasi (Norris, 2003). Konsistensi media menjalankan peran tersebut menjadi tolak-ukur majunya demokrasi dalam suatu bangsa.

Melihat hubungan media massa dan peristiwa politik yang terjadi pasca pemilu atau lebih tepatnya seputar kinerja pemerintahan presiden dan wakil presiden yang baru, peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam pemberitaan media massa terhadap pemerintahan tersebut. Peneliti kemudian tertarik terhadap kinerja pemerintah dalam 100 hari pertama¹ yang diberitakan oleh sejumlah surat kabar nasional di Indonesia. Peneliti ingin mengkaji hubungan media massa dalam mengkonstruksi berita terkait pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.

Memang secara resmi pemerintahan Jokowi – JK tidak mencanangkan program 100 hari pertama. Namun, sejumlah media massa banyak yang membuat istilah “kinerja 100 hari pertama pemerintah”. Bahkan media online seperti *Liputan6* membuat *hashtag* khusus yakni #100hari pertama dalam beberapa berita yang mereka muat, tidak terkecuali media cetak nasional. Harian *Republika* dalam berita yang berjudul “Tantangan 100 Hari Jokowi” juga berbicara seputar tantangan yang harus dihadapi pemerintah baru dalam 100 hari pertama.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam tesis ini penelitian fokus terhadap media massa dalam mengkonstruksi realitas politik melalui teks berita. Pemberitaan berkaitan terhadap isu seputar pemerintahan pasca pemilu 2014, yakni pemberitaan mengenai 100 hari pemerintahan Jokowi-JK. Penelitian ini secara khusus mengkaji surat kabar sebagai bagian dari pers nasional. Pers nasional merupakan surat kabar yang dioperasikan oleh perusahaan pers nasional dan dimaksudkan untuk membedakannya dari pers daerah. Pers nasional memiliki kantor utama di ibukota negara sebagai pusat institusi pers tersebut dan memiliki pemberitaan secara nasional.

Oleh sebab itu, observasi dalam kajian ini adalah tiga surat kabar nasional terbesar, yaitu: *Kompas*, *Republika*, dan *Media Indonesia*. *Kompas* merupakan koran nasional terbesar yang membuatnya sangat berpengaruh dalam pembentukan opini publik, dan dalam penelitian ini ditempatkan sebagai surat kabar umum. Sementara itu, walaupun koran umum, *Media Indonesia* memiliki ciri tersendiri, yaitu pemiliknya seorang politisi, bahkan petinggi salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Selanjutnya, *Republika* merupakan surat kabar ini lebih ditempatkan sebagai media yang mewakili kepentingan umat Islam yang merupakan agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia. Ketiga surat kabar tersebut paling sering dijadikan sampel penelitian untuk mengkaji *performance* pers di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan *passionate participant*, fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial. Sehingga peneliti dengan realitas objek yang diteliti bukanlah dua hal yang terpisah sama sekali. Penelitian kualitatif bertujuan menggali sedalam – dalamnya

¹ Pertama kali istilah ini digunakan oleh masyarakat, media massa dan akademisi di Amerika Serikat sebagai ukuran keberhasilan pemerintahan sejak Franklin D. Roosevelt (FDR) memelopori konsep 100 hari ketika ia menjabat presiden pada tahun 1933. Setelah diperkenalkan dan dipelopori oleh FDR, istilah 100 hari pertama populer di kalangan masyarakat dan menjadi konvensi bagi siapapun tokoh publik yang tampil di tampuk eksekutif (Jawa Pos, edisi 30 Januari 2015).

informasi mengenai fenomena yang sedang diteliti. Lingkup kedalaman data lebih dipentingkan daripada aspek keluasan data (Kriyantono, 2009:52).

Paradigma penelitian ini adalah paradigma konstruksionis yang sering disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Paradigma ini memandang komunikasi sebagai suatu proses produksi dan pertukaran makna. Dua hal yang menjadi karakteristik penting dari paradigma ini adalah politik pemaknaan dan proses seseorang membuat gambaran tentang realitas dan komunikasi sebagai sebuah kegiatan yang dinamis (Eriyanto, 2007: 43). Paradigma konstruksionis memperlihatkan interaksi kedua pihak, komunikator dan komunikan untuk menciptakan pemaknaan atau tafsiran dari suatu pesan.

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah artikel berita utama seputar 100 hari pemerintahan Jokowi-JK yang dimuat dalam tiga surat kabar, yakni *Kompas*, *Republika* dan *Media Indonesia*. Edisi yang dipilih pada rentang waktu 20 Oktober 2014- 27 Januari 2015 bertepatan dengan berakhirnya 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK. Artikel yang diteliti merupakan berita utama pada masing-masing surat kabar, dimana berita tersebut memiliki tema yang sama sehingga dapat dilihat perspektif dan pengkonstruksian tiap surat kabar terhadap berita 100 hari pemerintahan Jokowi-JK.

Tabel 2. Subjek Penelitian

Edisi	<i>Kompas</i>	<i>Republika</i>	<i>Media Indonesia</i>
Senin, 27 Oktober 2014	Saatnya Bekerja	Menteri Langsung Bekerja	Selamat Bekerja Kabinet Kerja
Selasa, 4 November 2014	Bantuan Nontunai Diperluas	'Kartu Jokowi' Jaga Daya Beli	Warga Antusias Sambut KIP-KIS
Selasa, 18 November 2014	Saatnya APBN Bagi Pembangunan	BBM Naik Rp. 2000/Liter	Jaga Pasokan Sembako
Sabtu, 6 Desember 2014	Indonesia Tegaskan Jaga Laut	Penenggelaman Kapal Asing untuk Efek Jera	Tiga Kapal Pencuri Diledakkan
Kamis, 15 Januari 2015	Jokowi Tunggu Proses di DPR	Jokowi Tunggu DPR	Jokowi Timbang Politik dan Hukum
Senin, 19 Januari 2015	Pesan Tegas Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba	Ratusan Terpidana Menyusul	Hukuman Mati Lindungi Rakyat
Sabtu, 24 Januari 2015	Pelemahan KPK Sistematis	Jokowi: Jangan Ada Gesekan	Presiden Minta Hukum Objektif

Penelitian ini menggunakan perangkat model framing Pan & Kosicki untuk menganalisis setiap unsur secara mendetail dari teks yang terdapat pada suatu tulisan. Analisis dilakukan pada isi media dalam satu edisi sampai selesai kemudian

dilanjutkan dengan analisis pada edisi selanjutnya. Penjelasan analisis berdasarkan model Pan & Kosicki dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Perangkat Framing Adaptasi Pan & Kosicki

SRTUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema penulisan	<i>Headline, lead, latar informasi, kutipan, data riset, pernyataan, penutup.</i>
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan penulisan	5W + 1H
TEMATIK Cara wartawan menulis	3. Detail 4. Maksud kalimat, hubungan 5. Bentuk kalimat 6. Kata ganti	Paragraf, proposisi
RETORIS Cara media menekankan fakta	7. Leksison 8. Grafis 9. Metafor 10. Pengandaian	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber: Eriyanto (2007:295).

C. HASIL PENELITIAN

Perbandingan Frame Berita Edisi Senin, 27 Oktober 2014 – Pengumuman Kabinet Menteri

Frame yang ditunjukkan harian *Kompas*, *Republika*, dan *Media Indonesia* pada edisi Senin, 27 Oktober 2014 memiliki perbedaan penonjolan. Frame yang ditunjukkan oleh *Kompas* ialah pengumuman susunan yang mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Hal tersebut ditunjukkan dengan penekanan pemilihan wawancara narasumber yang berasal dari berbagai kalangan. Baik dari kalangan tokoh politik, akademisi maupun dari tokoh agama Islam maupun Kristen yang semua mendukung susunan Kabinet Kerja yang diumumkan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla. *Kompas* ingin mengkonstruksikan pesan bahwa susunan kabinet menteri oleh presiden telah mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak dan berbagai kalangan.

Frame *Republika*, menekankan paparan susunan menteri yang diumumkan oleh Jokowi-JK yang terdiri dari 34 menteri yang berasal dari 19 profesional dan 15 partai politik. *Republika* sedikit lebih berani dibanding *Kompas* dengan menjelaskan secara lebih detail tentang komposisi dari 34 menteri tersebut. Narasumber yang diwawancarai oleh *Republika* hampir semua tokoh yang berasal dari ranah politik. Menariknya, dalam berita ini *Republika* cukup banyak memasukkan wawancara dengan tokoh dari partai politik berbasis agama Islam. Seperti Lukman Hakim dan Nur Hidayat Wahid.

Media Indonesia dalam beritanya seputar pengumuman susunan menteri oleh Jokowi-JK menekankan frame beritanya pada harapan tinggi masyarakat yang

diberikan kepada 34 menteri tersebut. Berbeda dengan *Kompas* dan *Republika*, berita *Media Indonesia* kali ini hanya terdiri dari sedikit alinea. Narasumber pun juga hanya berasal dari presiden Jokowi saja, tanpa ada wawancara narasumber lain. Berita hanya didukung dengan foto-foto para menteri baru lengkap dengan posisi jabatan mereka.

Perbandingan Frame Berita Edisi Selasa, 4 November 2014 – Peluncuran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera

Frame yang ditunjukkan harian *Kompas*, *Republika*, dan *Media Indonesia* pada edisi Selasa, 4 November 2014 memiliki perbedaan karakteristik. Surat kabar *Kompas* memilih frame peluncuran bantuan nontunai oleh pemerintah sebagai upaya mengantisipasi rencana kenaikan bahan bakar minyak yang akan segera diberlakukan oleh pemerintah. Dan peluncuran bantuan nontunai tersebut disambut antusias oleh warga. Hal tersebut didukung dengan *Kompas* menampilkan sejumlah wawancara dengan warga penerima bantuan yang merasa terbantu dengan diluncurkannya sejumlah kartu sakti Jokowi. *Kompas* ingin menunjukkan pesan, bahwa upaya-upaya pemerintah meluncurkan sejumlah kartu sakti sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan kebijakan pro masyarakat.

Sementara itu, *Republika* memilih frame bahwa rencana kenaikan harga bahan bakar menjadi alasan utama pemerintah meluncurkan sejumlah kartu sakti kepada warga. Kenaikan harga bahan bakar dinilai oleh *Republika* sebagai pembenaran pemerintah dalam meluncurkan kartu sakti tersebut. Lebih berani, *Republika* melihat frame berita pada sisi bahwa dibalik peluncuran kartu sakti ada agenda lain, yakni kenaikan harga bahan bakar minyak. Wawancara narasumber pun hanya berasal dari internal pemerintah, tidak ditampilkan wawancara dengan warga penerima bantuan.

Perbandingan Frame Berita Edisi Selasa, 18 November 2014 – Seputar Kenaikan Harga BBM

Frame yang ditunjukkan harian *Kompas*, *Republika*, dan *Media Indonesia* pada edisi Selasa, 18 November 2014 memiliki perbedaan konstruksi pesan. Menanggapi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dalam menaikkan harga bahan bakar (BBM) *Kompas* melihat peristiwa kenaikan BBM akan digunakan untuk subsidi bahan bakar untuk program pembangunan Indonesia. Narasumber secara serempak ditampilkan oleh *Kompas* mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM akan berdampak baik bagi program pembangunan. *Kompas* menekankan konstruksi berita pada rasa optimis dengan kebijakan kenaikan BBM yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Jk tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan *Kompas*, frame yang dipilih oleh *Republika* juga tentang subsidi BBM yang bisa dialihkan ke program lain yang lebih penting. Ada satu narasumber yang mengkritik kebijakan pemerintah ditampilkan oleh *Republika* dalam berita ini. Yakni pendapat dari anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Walaupun lebih banyak narasumber yang mendukung, *Republika* tetap memberi ruang pembaca untuk tetap bisa kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

Melihat dari sudut pandang lain, *Media Indonesia* menekankan frame pada kenaikan harga BBM yang dapat menghemat Rp. 100 triliun untuk dialokasikan ke sektor lain. *Media Indonesia* juga menyebutkan bahwa kenaikan BBM tidak langsung berdampak pada harga makanan, namun pada harga sayuran dan

sembako. Dengan memilih frame tersebut, *Media Indonesia* memilih konstruksi berita bahwa kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak perlu didukung karena dapat menghemat cukup banyak anggaran. Narasumber yang ditampilkan oleh *Media Indonesia* juga seluruhnya mendukung kebijakan pemerintah.

Perbandingan Frame Berita Edisi Sabtu, 6 Desember 2014 – Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan

Frame yang ditunjukkan harian *Kompas*, *Republika*, dan *Media Indonesia* pada edisi Selasa, 6 Desember 2014 memiliki perbedaan konstruksi pesan. Frame *Kompas* terhadap peledakan kapal asing ilegal sebagai bentuk tegas pemerintah Indonesia menjaga laut Indonesia. *Kompas* juga menekankan bahwa penenggelaman kapal asing pencuri ikan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Wawancara dengan narasumber yang *Kompas* pilih lebih banyak mereka yang mendukung secara positif terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal *Kompas* menekankan kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai tindakan tegas yang harus dilakukan.

Berbeda pula frame yang dipilih oleh *Media Indonesia* dalam memuat berita tersebut. *Media Indonesia* menekankan pada tindakan peledakan kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan sudah sesuai dengan hukum Indonesia. Penenggelaman kapal juga tidak mengganggu hubungan antarnegara. Frame tersebut didukung dengan wawancara sejumlah narasumber yang membenarkan bahwa penenggelaman kapal sudah sesuai hukum dan moratorium dari KKP.

Perbandingan Frame Berita Edisi Kamis, 15 Januari 2015 – Penetapan Calon Kapolri Budi Gunawan sebagai Tersangka Korupsi oleh KPK

Frame yang ditunjukkan harian *Kompas*, *Republika*, dan *Media Indonesia* pada edisi Kamis, 15 Januari 2015 memiliki perbedaan konstruksi pesan. Frame yang diambil *Kompas* dalam mengkonstruksi berita ini yakni presiden Jokowi yang mempertimbangkan kembali pelantikan Budi Gunawan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Wawancara dengan sejumlah tokoh politik yang mempunyai pandangan bertolak belakang: yang satu menilai Budi Gunawan sesuai prosedur sehingga pantas dilantik sebagai Kapolri, pihak lain menanggapi bahwa Budi tidak layak dilantik sebagai Kapolri. Kedua pendapat disertai dengan bukti dan alasan yang sama-sama kuat. Namun, *Kompas* lebih banyak memberikan porsi kepada para tokoh yang menolak pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Sementara itu, *Media Indonesia* melihat dari sudut komisi III DPR yang meloloskan Budi Gunawan dalam *fit and proper test*. Berbeda dengan *Kompas* dan *Republika*, frame *Media Indonesia* lebih banyak menampilkan pernyataan yang melakukan pembelaan Budi Gunawan dan apresiasi terhadap Komisi III DPR, sedangkan wawancara dari pihak yang menunda pelantikan tidak ditonjolkan. *Media Indonesia* lebih mengkonstruksikan berita yang melakukan pembelaan terhadap Budi Gunawan.

Perbandingan Frame Berita Edisi Senin, 19 Januari 2015 – Hukuman Mati Tersangka Narkoba

Frame yang ditunjukkan harian *Kompas*, *Republika*, dan *Media Indonesia* pada edisi Kamis, 19 Januari 2015 memiliki perbedaan. Frame yang ditunjukkan oleh *Kompas* ialah eksekusi para terpidana mati sebagai pesan tegas pemerintah Indonesia terhadap pelaku kejahatan perkara narkoba. Pesan yang ingin *Kompas* sampaikan, eksekusi tersebut sebagai upaya tegas dari pemerintah terhadap para

pelaku kejahatan narkoba di Indonesia. Wawancara mendukung hukuman mati bagi terpidana narkoba ditunjukkan diawal paragraf, disusul wawancara sejumlah pakar yang tidak setuju dengan hukuman mati termasuk dari pihak Duta Besar yang bersangkutan. Kemudian ditanggapi lagi oleh pakar tentang alasan pemberlakuan hukuman mati. Kedua pendapat disertai dengan bukti dan alasan yang kuat.

Frame yang ditunjukkan oleh *Republika* ialah masih ada 137 terpidana mati yang menunggu dieksekusi oleh pemerintah Indonesia. Ada dua pendapat yang berbeda dalam berita ini. Satu pihak setuju dengan eksekusi, satu pihak lain menentang eksekusi tersebut. Kedua pihak tersebut ditampilkan oleh *Republika* dengan porsi yang sama dan dari pendapat tokoh masing-masing. *Republika* juga menampilkan sejumlah tokoh dari agama Islam yang mendukung kebijakan pemerintah. Sementara itu, tokoh dari agama Katolik menolak dan tidak setuju dengan kebijakan yang diambil pemerintah.

Perbandingan Frame Berita Edisi Sabtu, 24 Januari 2015 – Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto

Frame yang ditunjukkan harian *Kompas*, *Republika*, dan *Media Indonesia* pada edisi Kamis, 24 Januari 2015 memiliki perbedaan. Frame yang ditunjukkan *Kompas* ialah Penangkapan Bambang Widjojanto tidak wajar dan sebagai bentuk pelemahan sistematis terhadap KPK. *Kompas* menampilkan lebih banyak kutipan wawancara para tokoh yang melihat penangkapan Wakil Ketua KPK tidak wajar dan memberikan dukungan kepada KPK dengan porsi yang jauh lebih banyak serta penempatan yang lebih menonjol dibandingkan pihak yang berlawanan.

Sementara itu, frame *Republika* menunjukkan Jokowi yang menginteruksikan kepada KPK dan Polri agar tidak terjadi gesekan dalam menyelesaikan kasus ini. *Republika* lebih kritis melihat sosok Jokowi sebagai juru kunci dalam kasus ini. *Republika* lebih banyak menanggapi interuksi presiden agar tidak terjadi gesekan. i tidak menampilkan pernyataan yang menyalahkan dari satu pihak ke pihak lain, namun lebih kepada kerjasama kedua piha (KPK dan Polri) dalam menghadapi kasus ini.

D. PEMBAHASAN

1. Objek Frame Berita Utama

Secara konsisten objek frame berita utama ketiga media lebih fokus lebih pada kasus-kasus besar yang berhubungan dengan politik dan hukum. Terdapat tujuh isu besar utama yang disorot oleh ketiga media selama 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK dalam penelitian ini, yakni : pengumuman Kabinet Kerja, peluncuran kartu sakti Jokowi, kenaikan harga BBM, penenggelaman kapal asing pencuri ikan, pencalonan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, eksekusi hukuman mati, dan kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Polri.

Tujuh objek frame berita utama tersebut merupakan peristiwa kebijakan yang diambil pemerintah dalam 100 hari pertama. Tujuh topik berita utama tersebut mendapat fokus dan porsi yang lebih banyak oleh media daripada topik-topik lain yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-JK.

Pemilihan objek berita tersebut merupakan salah satu bentuk kekuatan politik media dalam membentuk wacana politik (*agenda setting*) yang menjadi pembicaraan dalam struktur politik dan dalam masyarakat. Melihat kesamaan pada ketiga objek berita dominan tersebut dapat dijelaskan bahwa media sangat tanggap dalam mengikuti perkembangan masalah politik, terlebih yang melibatkan petinggi negara,

dan yang dampaknya sangat luas baik bagi masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kasus kenaikan harga BBM sebagai objek berita yang paling tinggi frekuensi pemberitaan memperlihatkan bahwa media mampu melihat persoalan-persoalan yang sangat berdampak pada masyarakat Indonesia secara luas. Selain itu, kasus KPK vs Polri (pencalonan Kapolri Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Polri) juga memiliki frekuensi yang tinggi pada akhir masa 100 hari pertama. Media mampu mengungkap permasalahan yang kembali mencuat antara dua lembaga tersebut, dimana pada masa pemerintahan presiden SBY kedua lembaga juga pernah terlibat pertikaian yang sama. Melalui pemilihan objek berita yang paling menarik perhatian publik tersebut, media ingin menegaskan bahwa hukum menjadi alat utama untuk menegakkan demokrasi dan memberantas praktek korupsi yang mengakar, dan langkah pertama terpenting untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan membersihkan lembaga-lembaga penegak hukum dan aparatnya.

Satu objek frame lain yang cukup mencolok adalah Presiden Joko Widodo sendiri. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden berperan baik sebagai kepala negara, maupun sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan tertinggi untuk menjalankan agenda pemerintahan, termasuk dalam menegakkan hukum dan memberantas kasus korupsi.

Temuan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya mencari dan mengirimkan informasi apa adanya, tetapi berpartisipasi secara aktif menyikapi dinamika politik yang ada. Media berupaya mengangkat topik-topik yang lebih memiliki dampak signifikan bagi masyarakat, dan menyusun konteks yang tepat untuk memahaminya, termasuk lembaga dan individu yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah tersebut yang dalam ini adalah sosok presiden itu sendiri.

2. Sikap Politik Berita Utama

Sikap politik berita utama ketiga media cenderung bersifat netral terhadap isu-isu berita yang diangkat. Netralitas ini khususnya tampak dominan pada berita utama *Kompas* dan *Republika*. Sementara itu, sikap berita utama *Media Indonesia* selalu lebih partisan di antara ketiga media tersebut. Sikap netral yang begitu dominan pada berita utama dapat disebabkan oleh desakan kaidah-kaidah jurnalistik yang harus diperhatikan oleh jurnalis dalam menulis berita. Berita utama perlu memperhatikan dasar-dasar jurnalistik seperti objektivitas, imparialitas, *fairness*, dan seterusnya, yang mendorong media tidak terlalu leluasa untuk menyatakan sikap politiknya.

Terlihat sifat kehati-hatian *Kompas* dan *Republika* dari berita utamanya ini. Kehati-hatian media dalam menyatakan sikap oposisional maupun partisan lewat berita utama berkorelasi dengan sifat sikapnya. Sikap oposisional berita utama cenderung bersifat reaktif, di mana media lebih banyak mengikuti sikap politik oposisional yang diusung oleh pihak lain, ketimbang sebagai bentuk inisiatif sendiri. Sikap partisan berita utama cenderung lebih berpihak, menyatakan dukungan melalui berita utama yang ditampilkan. Sementara itu, sikap netral berita utama lebih sangat dominan hasil keputusan media itu sendiri. Sikap netral memang tidak terlalu memiliki konsekuensi politis bagi media, sehingga mereka lebih cenderung untuk memilih sikap ini.

Dari temuan ini, terlihat bahwa media dihadapkan bahwa suatu dilema tersendiri ketika ingin menjalankan fungsi *watchdog*. Menjalankan fungsi *watchdog*

lewat sikap politik yang mereka pilih membawa implikasi yang mungkin saja dapat menurunkan citra media itu sendiri, karena cenderung melayangkan kritik kepada pemerintah. Atau bisa berdampak pada menurunnya standar kepatuhan pada prinsip-prinsip jurnanisme yang ada.

Berbeda dengan penjelasan Kriesi tentang penantang dan pendukung yang memasukkan anggota partai politik sebagai bagiannya, penantang yang dimaksud disini lebih dipahami sebagai individu-individu maupun kelompok atau organisasi yang tidak berakaitan dengan struktur politik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi memiliki orientasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara laus. Mereka lebih tepat disebut sebagai *the outsiders* dalam struktur politik. Partai politik cenderung memiliki kepentingan dengan tiga lembaga yang ada, sebab bisa jadi mereka memiliki anggota di lembaga tersebut.

Individu yang menjadi sasaran utama dalam pemerintahan adalah Presiden Joko Widodo sendiri, disusul Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri, sejumlah ketua umum (seperti KPK, PPATK), serta hakim, jaksa, dan polisi. Presiden sebagai sasaran utama sikap politik berita utama memperlihatkan bahwa media mengamini bahwa presidenlah orang yang paling bertanggung jawab atas segala perihal masalah dan kebijakan yang daingkat dalam pemberitaan ketiga media tersebut. Keyakinan ini tentu tidak lepas dari prinsip sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden berperan baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, presiden bertanggung jawab langsung dan penuh atas rutinitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, lembaga yang menjadi fokus utama sasaran sikap politik media adalah lembaga-lembaga penegak hukum di tanah air, seperti: KPK, Polri, kejaksaan dan Mahkamah Agung. Lembaga yang menjadi sasaran berita utama ini berkaitan dengan sejumlah kasus yang di angkat oleh ketiga media. Kasus-kasus yang diangkat oleh ketiga media massa tersebut sangat erat berhubungan dengan lembaga penegak hukum.

Penutup

Simpulan

Pertama, surat kabar *Kompas*, *Republika*, dan *Media Indonesia* dalam membingkai sebuah peristiwa politik menjadi sebuah realitas media dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: ideologi yang tercermin dari salah satu berdirinya surat kabar *Kompas*, *Republika*, dan *Media Indonesia*, visi dan misi dari ketiga media, motto, gaya bahasa, dan isi ketiga media, serta sejarah modal perusahaan. Sejarah modal perusahaan meski tidak menjadi faktor konstruksi yang dominan namun tetap memiliki pengaruh terhadap konstruksi berita yang dihasilkan. *Kedua*, individu menjadi menjadi sasaran sikap politik berita utama ketiga surat kabar. Pemilihan target pada individu dalam berita utama membawa dampak yang cukup kuat, selain karena berita utama merupakan berita yang paling cepat dan sering dibaca oleh masyarakat, juga karena spesifikasinya orang yang dianggap bertanggung jawab pada masalah yang diangkat dalam berita tersebut. Dalam penelitian ini, individu yang paling banyak menjadi target adalah Presiden Joko Widodo.

Saran

Dari pengemasan pesan oleh media terdapat sejumlah realitas yang tersembunyi di balik sebuah teks berita. Realitas yang tersembunyi itu tiada lain adalah fakta sosial berupa bermacam kepentingan ideologis media, ekonomis maupun teknis. Oleh sebab itu, memahami/mempelajari isi media dari aspek teknik tidak memadai lagi. Penjelasan tentang isi media harus menyentuh fakta-fakta sosial yang potensial masuk kedalam teks berita. Mengajarkan menulis teks dengan penekanan pada aspek teknis saja sudah harus disempurnakan dengan strategi pengemasan pesan secara komperhensif.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Abrar, Ana Nadya. 1995. *Penulisan Berita*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: Rosda Karya.
- Althaus, Scott L. 2003. When News Norms Collide, Follow the Lead: New Evidence for Press Independence. *Political Communication*, 20.
- Baran, Stanley J & Davis, Dennis K. 2009. *Teori Komunikasi Massa : Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Budiman, Kris. 1999a. *Feminografi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cook, Timothy E. 1998. *Governing with the News: The News Media as a Political Institution*. Chicago: The University of Chicago Press..
- Eilders, Christiane. 2000. "Media as Political Actors? Issu Focusing and Selective Emphasis in the German Quality Press". *German Politics*, Vol. 9, No. 3.
- Entman, Robert M. 1993. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 41 (4).
- Eriyanto. 2007. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Gamson, William A and Modigliani, Andre. 1989. "Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach". *American Journal of Sociology* Vol. 95 No. 1 (July).
- Hall, Stuart. 1982. *The Rediscovery of Ideology: The Return of the Repressed in Media Studies, Culture Society, and Media*. London: Methuen.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Hatchen, William A. 1981. *The World News Prism: Changing Media, Clashing Ideologies*, second edition. Iowa: Iowa State University Press.
- Junaedi, Fajar. 2013. *Komunikasi Politik*, Yogyakarta : Buku Litera.
- Krauss, Ellis S. 2000. Japan: "News and Politics in a Media-Saturated Democracy". Dalam Richard Guther and Anthony Mughan (eds) *Democracy and the Media: A Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Public Relations Writing: Teknik Produksi Media Public Relations dan Publisitas Korporat*. Jakarta: Kencana.
- McNair, Brian. 2003. *An Introduction to Political Communication*, Third edition. London & New York: Routledge.
- McQuail, Denis. 2003. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga
- McQuail, Denis. 2000. *McQuail's Mass Communication Theory*. Fourth edition. London: Sage Publications.
- Meleong, J.Lexy. 2006. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-32. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan D. 1978. *Political Communication and Public Opinion in America*. Santa Monica: Goodyear Publication.
- Norris, Pippa. 2003. *A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugroho, Yanuar, Laksmi Shinta.S. 2013. *Melampaui Aktivisme click? Media Baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Page, Benjamin I. 1996. "The Mass Media as Political Actors". *PS: Political Science and Politics*, Vol. 29, No. 1 March, pp. 20-24.

- Peterson, Theodore. 1963. "The Responsibility Theory". Dalam Siebert, Peterson, and Schramm. 1963. *Four Theories of the Press*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
- Rahabeat, Rudolf. 2004. *Politik Persaudaraan Membedah Peran Pers*. Yogyakarta: Buku Baik
- Rivers, William L., Jensen, Jay W., Petersen, Theodor. 2003. *Media Massa & Masyarakat Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Robinson, Piers. 2001. "Theorizing the Influence of Media on World Politics, Model of Media Influence on Foreign Policy". *European Journal of Communication* Vol. 16.
- Sheafer, Tamir and Wolfsfeld, Gadi. 2009. "Party System and Oppositional Voices in the News Media. A Study of the Contest over Political Waves in the United State and Israel". *International Journal of Press/ Politics*, Volume 14 Number 2 (April), pp. 146-165.
- Siebert, Fred S. 1963. "The Authoritarian Theory". Dalam Siebert, Peterson, and Schramm. 1963. *Four Theories of the Press*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
- Simarmata, Salvatore. 2014. *Media & Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia
- Sobur, Alex. 2009. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sudiby, A. Hamad, I, Qodari, M. 2001. *Kabar-Kabar Kebencian: Prasangka Agama di Media Massa*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).